

# PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

Yuni Harteti<sup>1</sup>, Darwanis<sup>2</sup>, Syukriy Abdullah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2</sup>) Staff Pengajar Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

**Abstract:** *This study aimed to examine the effect of fiscal decentralization and the regional expenditures of the regional financial performance in the district /city at the province of Aceh either jointly or partially. The population in this study are the district/city in the province of Aceh during the 5 period (2009-2013). Research using census method. The data are process by using a balanced panel data. The total population in 2009 up to 2013 are 18 districts and 5 cities. The method of analysis used in this study were multiple linear regression. The results of this study show that (1) fiscal decentralization and regional expenditures together affect the regional financial performance. (2) The partial positive effect of fiscal decentralization, while regional expenditures negatively affect of regional financial performance.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization, Regional Expenditures, Regional Financial Performance*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi aceh baik secara bersama-sama atau parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Populasi pada penelitian ini adalah kabupaten/kota di provinsi Aceh selama 5 periode (2009-2013). Penelitian menggunakan metode sensus. Data di proses dengan menggunakan balanced panel data. Total populasi tahun 2009 s.d 2013 sebanyak 18 kabupaten dan 5 kota. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) desentralisasi fiskal dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. (2) Secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah.

## 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada dilaksanakannya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah

daerah. Implementasi otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan adalah sebagai format kebijakan yang diharapkan mampu memecahkan problema keuangan pemerintah pusat, dikarenakan sebelum era otonomi daerah, pemerintah pusat menguasai pendapatan daerah sehingga daerah sangat tergantung pada alokasi bantuan dari pusat.

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang memakai metode desentralisasi mempunyai kewenangan yang sangat luas. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menciptakan pemberdayaan pemerintah daerah dan

masyarakat daerah agar dapat mengembangkan daerahnya secara mandiri. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Junarwati, 2014).

Sumber-sumber keuangan tersebut beserta dengan anggaran yang akan dibelanjakan dituangkan dalam rencana keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah (Pemda), yang disepakati dan ditetapkan bersama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Peraturan Daerah (Abdullah, 2013). APBD merupakan penunjang dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh kinerja keuangan daerah yang memadai. Menurut Halim (2004:24), "kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah tersebut dalam menjalankan otonomi daerah. Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas suatu proses atau suatu unit organisasi".

Kabupaten/kota di provinsi Aceh yang mengalami peningkatan rasio serapan

anggaran belanja daerah tahun 2009-2011 yaitu kabupaten Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Nagan Raya dan Pidie Jaya. Sedangkan kabupaten mengalami penurunan yaitu kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tenggara mengalami peningkatan rasio yang sangat besar di tahun 2010 sebanyak 14,08% dan kembali mengalami penurunan sebesar 6,04% ditahun berikutnya, sedangkan kabupaten Bireun mengalami penurunan rasio yang drastis sebesar 9,46% ditahun 2010 dan meningkat 5,92% ditahun berikutnya. Dalam kondisi tersebut menggambarkan bahwa kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota tersebut telah mengalami perubahan yang bervariasi jika dilihat dari rasio serapan anggaran belanja daerah.

Desentralisasi fiskal menjadi salah satu "pilar" dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, dikarenakan dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah (Pakasi, 2005). Beberapa studi literatur telah menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah (Rondinelli, Mc. Cullough, dan Johnson, 1989; Detisa 2010; dan Nasution 2010). Rondinelli, Mc. Cullough, dan Johnson (1989) menyimpulkan bahwa desentralisasi dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi dan budaya, sampai seberapa jauh tersedianya sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggung jawab. Desentralisasi

fiskal merupakan isu kebijaksanaan keuangan daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Hasil penelitian Detisa (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian Detisa (2010) dan Rondinelli, Mc. Cullough, dan Johnson (1989) tidak searah dengan Nasution (2010) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah.

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan daerah yaitu belanja daerah. Belanja Daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva/ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri (Bastian dan Gatot, 2003:85). Sedangkan Belanja Daerah menurut UU No. 33/2004 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa belanja daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah (Helmi 2008; Putri 2010; dan Mustikarini dan Debby 2012). Helmi (2008) menyimpulkan dalam studi literaturnya bahwa belanja pemerintah bidang

pertanian, pariwisata berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda sedangkan belanja pertambangan berpengaruh sangat negatif terhadap kinerja Pemda. Belanja pemerintah dibidang pertambangan perlu dikurangi dan digabung dengan belanja pertambangan pada BUMD sehingga mampu menerapkan pengelolaan keuangan secara lebih baik. Hasil penelitian Putri (2010) menunjukkan bahwa semakin besar belanja daerah yang dihasilkan dengan melakukan perkembangan irigasi, jaringan, dan transportasi, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan hasil studi literatur Mustikarini dan Debby (2012) yang menjelaskan bahwa variabel belanja daerah ternyata terbukti berpengaruh negatif signifikan. Pemerintah daerah dengan total belanja yang besar ternyata membuat kinerjanya semakin tidak baik.

## **2. KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **2.1 Pengertian dan Pengukuran Desentralisasi Fiskal**

Menurut Halim (2004:24), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktifitas suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud

akuntabilitas dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai tolak ukur peingkatan program selanjutnya. Sedangkan menurut Sucipto (2003) kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode.

Variabel kinerja keuangan daerah dihitung dengan rumus rasio serapan anggaran sebagai berikut (Mahsun, 2009:17):

$$RSA = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

McCullough, dan Johnson (1989) yang menunjukkan bahwa desentralisasi dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi dan budaya, serta sampai sejauh mana tersedianya sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapatkan pelimpahan tanggung jawab tersebut. Hasil penelitian Detisa (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian Zhang, Zhang, dan Chen (2012) juga searah dengan Rondinelli, McCullough, dan Johnson (1989), Detisa (2010) dan Adam, Delis, dan Kammas (2008) yang menunjukkan desentralisasi

fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh.

### **3.2 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Putri (2010) juga menyimpulkan bahwa kinerja keuangan yang cukup bagus pada suatu daerah tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam belanja-belanja yang tidak perlu dilakukan, maka kedepannya Pemda harus bisa mengefektifkan belanja yang harus dilakukan agar tercapainya *good governance*.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Purba (2006) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun. Demikian hasil pula dengan penelitian Rustiono (2008) menyimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Namun hasil penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif antara belanja daerah dengan kinerja keuangan daerah. Seperti hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyimpulkan bahwa variabel belanja daerah ternyata terbukti berpengaruh negatif signifikan.

Sedangkan penelitian Helmi (2008)

menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pertanian, pariwisata berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda sedangkan belanja pertambangan berpengaruh sangat negatif terhadap kinerja Pemda. Belanja pemerintah dibidang pertambangan dikurangi dan digabung dengan belanja pertambangan pada BUMD sehingga mampu menerapkan pengelolaan keuangan secara lebih baik.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh.

#### **4. METODE PENELITIAN**

##### **4.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian dijelaskan sebagai berikut (Sekaran, 2007:177):

##### **1. Tujuan Studi**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis (hypothesis testing) yang telah dikembangkan berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu. Hipotesis yang dirumuskan menjelaskan pengaruh antara variabel.

##### **2. Pengaturan Studi**

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini diperlukan data dari lingkungan yang sebenarnya yaitu studi lapangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

##### **4. Jenis Investigasi**

Penelitian ini bersifat korelasional, yaitu

penelitian yang menjelaskan pengaruh antara variabel yang diteliti, yaitu variabel kinerja keuangan daerah sebagai variabel dependen dan variabel derajat desentralisasi fiskal sebagai variabel independen.

##### **5. Intervensi Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti tidak bermaksud untuk melakukan intervensi dan manipulasi data untuk mempengaruhi hasil. Tingkat intervensi adalah minimal.

##### **6. Horizon waktu**

Dalam penelitian ini horizon waktu yang dilakukan adalah studi cross sectional dimana data yang dikumpulkan lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

##### **7. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Aceh berupa data laporan keuangan kabupaten/kota.

##### **4.2 Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang memiliki laporan keuangan per 31 Desember untuk tahun 2009-2011.

Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh adalah sebanyak 23, yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian sensus dimana penelitian ini menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian. Pemilihan populasi dilakukan dengan menggunakan metode sensus yaitu suatu metode pemilihan populasi yang digunakan

untuk meneliti semua elemen yang ada dalam semua wilayah atau sasaran penelitian (Sugiyono, 2004:77).

#### 4.3 Metode Analisis

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda yang menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa Variabel independen. Analisis ini bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2009 sampai 2011.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Dimana:

- Y = Kinerja Keuangan Daerah;
- $\alpha$  = Konstanta;
- $\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi;
- X1 = Derajat Desentralisasi Fiskal;
- X2 = Belanja Daerah; dan
- $\epsilon$  = Error Term

### 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berhubung penelitian ini menggunakan metode sensus, maka untuk pengujian hipotesis tidak dilakukan uji signifikansi, baik uji-t untuk pengaruh secara parsial maupun uji-F untuk pengaruh secara bersama-sama. Hasil regresi berganda yang distandarkan dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Regresi Berganda**

Y=120,307 + 0.315 X <sub>1</sub> - 1,955 X <sub>2</sub> + ε		
Nama Variabel	B	Standar Error

Konstanta (a)	120,307	13,317
Desentralisasi Fiskal (X <sub>1</sub> )	0,315	0,154
Belanja Daerah (X <sub>2</sub> )	-1,955	0,894
a. Predictors: (Constant), Desentralisasi Fiskal dan Belanja Daerah.		
b. Dependent variable: Kinerja Keuangan Daerah		

#### 5.1 Hasil Pengujian Secara Simultan

Nilai  $\beta$  dari kedua variabel independen yaitu desentralisasi fiskal dan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 1 Berdasarkan Tabel 1 didapatkan hasil bahwa  $\beta_i \neq 0$ , yaitu  $\beta_1 = 0,315$ ,  $\beta_2 = -1,955$ . Ini artinya H<sub>a1</sub> diterima, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa desentralisasi fiskal dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

#### 5.2 Hasil Pengujian Secara Parsial

##### 5.2.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa desentralisasi fiskal (X<sub>1</sub>) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Y) apabila  $\beta_1 \neq 0$ . Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menolak H<sub>0</sub> (hipotesis nol) atau menerima H<sub>a</sub> (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Setiap adanya kenaikan desentralisasi fiskal sebesar 1 (satu) satuan akan mengakibatkan penurunan terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 0.315

satuan, dengan asumsi variabel belanja daerah adalah konstan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Zang, Zhang, dan Chen (2012), Rondinelli, McCullough, dan Johnson (1989), Detisa (2010) dan Adam, Delis, dan Kammas (2008) yang menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah sehingga semakin tinggi desentralisasi fiskal akan semakin tinggi pula kinerja

### **5.2.2 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa belanja daerah ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah ( $Y$ ) apabila  $\beta_2 \neq 0$ . Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menerima  $H_a$  (hipotesis alternatif) atau menolak  $H_0$  (hipotesis nol). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Setiap adanya kenaikan belanja daerah sebesar 1 (satu) satuan akan mengakibatkan penurunan terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 1,955 satuan, dengan asumsi variabel desentralisasi fiskal adalah konstan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriarsari (2012) yang menyimpulkan bahwa variabel belanja daerah ternyata

terbukti berpengaruh negatif signifikan. Pemerintah daerah dengan total belanja yang besar ternyata membuat kinerjanya semakin tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pengeluaran Pemda lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin, bukan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian Mustikarini dan Fitriarsari (2012), Pemda harus bisa mengelola belanjanya dalam bentuk pengeluaran yang produktif sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Namun, hasil penelitian ini tidak searah dengan hasil penelitian Putri (2010), Purba (2006), dan Helmi (2008) yang menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Desentralisasi fiskal dan belanja daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh.
2. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh.
3. Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah pada

kabupaten/kota di provinsi Aceh.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran baik bagi pemerintah daerah dan bagi peneliti selanjutnya:

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya, setiap daerah kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Aceh diharapkan untuk dapat memaksimalkan belanja daerah agar dapat dinikmati oleh setiap penduduk didaerahnya baik dalam bentuk pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur maupun outcome dari program/kegiatan pemerintah daerah tersebut yang pada akhirnya dapat memaksimalkan fungsi dari desentralisasi fiskal.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk menambah variabel independen seperti fiscall stress atau menambah tahun pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan dasar penilaian tentang kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di Propinsi Aceh.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, Syukriy. 2013. *Defisit/Surplus dan SILPA dalam Anggaran Daerah ~ Apakah Saling Berhubungan?*. Melalui <http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/defisit-dan-surplus-dalam-anggaran-daerah-apakah->

[saling-berhubungan/](#).

Bahl, Roy W. 2000. *China: Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal Reform in Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt. United Kingdom: Cambridge Univercity Press.

Bastian, Indra & Gatot Soepriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Edisi. Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Bisma, I Dewa Gde & Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007*. *GaneÇ Swara Edisi Khusus*, Volume 4, Nomor 3, Desember: 75-86.

Detisa, Dora. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Khusus pada Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis. Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Halim, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Helmi, Achmad. 2008. *Peranan Belanja dan Penerimaan Daerah dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Provinsi Riau*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7, Nomor 2, September: 105 – 114.

Junarwati. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012*. Tesis. Banda Aceh: Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.

Khusaini, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan*



- Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Universitas Brawijaya.
- Maher, Craig S. & Karl Nollenberger. 2009. Revisiting Kenneth Brown's "10-Point Test". *Government Financial Review*, October: 61-66.
- Mahsun, Mohamad, 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mustikarini, Widya Astuti, dan Debby Fitriyani. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin, 20-23 September 2012.
- Nasution, Nina Andriany. 2010. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Pakasi, C. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. Disertasi. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Purba, Adearman. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun*. Tesis. Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Putri, Shintya Dewi Adi. 2010. Analisis Kinerja Keuangan pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*, Volume 1, Nomor 2, Maret: 139-150.
- Republik Indonesia, (2004). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, (2004). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Rondinelli, Dennis A., James S. McCullough, and Ronald W. Johnson. 1989. Analysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework. *Development and Change*, Volume 20, Nomor 1: 57-87.
- Rustiono, Deddy. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis. Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sucipto. 2003. Penilaian Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Sumatera Utara*. Melalui <http://repository.usu.ac.id/>.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.
- Zang, Shujian, Jun Zhang, and Shiyl Chen. 2012. Assessment of Local Public Finance Performance in China When Undesirable Fiscal

Phenomena are Taken into  
Account. *China & World  
Economy*, Volume 20, Issue 6: 82-  
101.